

1	2	3	4	5	6
6.	Data hasil uji laboratorium lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Akan memberikan informasi yang belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.	Laboratorium lingkungan belum Terakreditasi	Setelah lingkungan Akreditasi laboratorium mendapatkan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.	Laporan Hasil Pengujian Kontruksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat Mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga Data Pemohon	Sampai Ada Persetujuan Dari Pemohon dan yang berwenang
2.	Data Teknis Hasil Kegiatan, Survey Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf d	Permohonan Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai diterbitkannya Dokumen Resmi yang telah diandatangani pejabat berwenang

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.	Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan pengisian formasi yang ada
----	--	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6
2.	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang terkait Data Personal (siswa dan tenaga pendidik/kependidikan)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan oleh pihak - pihak tertentu	Melindungi data siswa dan tenaga pendidik/kependidikan agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas
3.	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h nomor 4	<ul style="list-style-type: none"> - Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah - Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain - Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang disupervisi 	Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas
4.	Proses penilaian akreditasi sekolah	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal ayat 2 dan 3	Dapat menimbulkan ketidakpuasan dari sekolah yang diakreditasi pada hasil penilaian	Menjaga agar proses penilaian dan hasil dari akreditasi sekolah oleh asesor bersifat obyektif	Sampai diumumkan hasil akreditasi

1	2	3	4	5	6
5.	Proses Penilaian Seleksi Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendeaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas - Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah 	Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil seleksi lebih obyektif Akan mendapatkan calon pengawas yang mendekati kriteria pengawas yang ideal personil yang disupervisi 	Sampai diumumkan lulusan dan pelantikan Pengawas Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah Daerah
6.	Naskah Soal Lomba Tingkat PAUD, SD, dan SMP	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggikan proses penilaian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjaga netralitas penilaian 	Sampai dilaksanakannya lomba

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); - SOP Petunjuk Teknis Lomba 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu proses penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga sportifitas peserta lomba 	

DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

1.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur
2.	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
3.	Biodata tenaga kerja asing	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan kepada TKKA	Tidak terbatas